

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

Bab IV ini berisi prioritas dan sasaran pembangunan daerah Jawa Barat Tahun 2018 yang dirumuskan dalam rangka mencapai target janji Gubernur dan visi misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Dokumen ini juga memuat kebijakan turunan dari prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, khususnya sembilan prioritas pembangunan (Nawa Cita).

Prioritas pembangunan disusun memperhatikan hasil evaluasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017, capaian target pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis internal-eksternal, sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya.

Substansi prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2018 mendasarkan dan memperhatikan:

1. Arah kebijakan Pemerintah yang dijabarkan dalam 9 prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) sebagaimana tercantum pada RPJMN 2015-2019.
2. Arah kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 guna mencapai visi misi sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan tahun 2018.
3. Konsistensi antara kebijakan Pemerintah dan Provinsi sebagai upaya pencapaian target pembangunan nasional maupun provinsi.
4. Penyelesaian terhadap masalah yang bersifat urgen pada tahun 2018.

Selanjutnya rumusan tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Jawa Barat dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan. Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya visi misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2013-2018 dan mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RKP 2018.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan landasan dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun lingkup daerah.

Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi 9 agenda Prioritas (Nawa Cita), yaitu:

- Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
- Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan

reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

- Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
- Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
- Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selanjutnya keterkaitan antara dimensi pembangunan dengan Nawa Cita dapat dijelaskan oleh Gambar 4.1 berikut



Gambar 4.1 Strategi Pembangunan Nasional

Sumber: RPJMN 2015 -2019

Selanjutnya sembilan-cita-cita (Nawa Cita) dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi perlu agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program quick wins. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu dari strategi pembangunan memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015 - 2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah.

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan Sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat yang telah tersusun diterjemahkan dalam bentuk program unggulan dan prioritas daerah yang akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2018. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tercantum pada dokumen ini merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD yang telah disusun. Selanjutnya tujuan merupakan suatu kondisi ideal yang ingin dicapai pada akhir periode dimana upaya pencapaiannya dilakukan dengan memenuhi sasaran yang telah ditentukan. Guna tercapainya sasaran pembangunan yang efektif dan efisien, harus didukung oleh strategi pembangunan yang ideal dan tepat sasaran. Ketiga hal tersebut nantinya akan menjadi acuan penyusunan program unggulan dan prioritas daerah Provinsi Jawa Barat di tahun 2018.

Tujuan, sasaran dan strategi pembangunan merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun 2013-2018. Kedudukan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 merupakan pelaksanaan tahun ke-4 (empat) dari proses penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 yaitu tahapan **“Memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh”** dalam rangka mencapai visi pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 yaitu:

“Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua”

Dalam mencapai visi tersebut, terdapat 5 (lima) misi yang harus dilaksanakan dengan tujuan dan sasaran, sebagaimana Tabel 4.1. berikut.

Tabel 4.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Misi Jawa Barat
2013-2018

Visi : “Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua”		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi Pertama, Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing.	Membangun sumber daya manusia Jawa Barat yang menguasai IPTEK, senantiasa berkarya, kompetitif, dengan tetap mempertahankan identitas dan ciri khas masyarakat yang santun dan berbudaya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata. 2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, serta perluasan akses pelayanan yang terjangkau dan merata. 3. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan kelembagaan serta berbudaya IPTEK. 4. Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga.
Misi Kedua, Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan.	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jawa Barat sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur. 2. Meningkatnya daya saing usaha pertanian. 3. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi. 4. Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan. 5. Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional.
Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas birokrasi yang profesional dan akuntabel dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembangunan partisipatif. 2. Terwujudnya pemerintahan yang modern. 3. Terwujudnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik. 2. Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan berbasis IPTEK. 3. Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kesejahteraan aparatur. 4. Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran

	<p>profesionalisme pemerintahan yang didukung oleh aparatur yang kompeten.</p> <p>4. Meningkatkan stabilitas di daerah.</p>	<p>politik dan hukum.</p>
<p>Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan.</p>	<p>1. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan.</p> <p>2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas ekonomi, dan pelayanan dasar.</p>	<p>1. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana.</p> <p>2. Meningkatnya kualitas pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat.</p> <p>3. Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis.</p>
<p>Misi Kelima, Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal.</p>	<p>1. Mewujudkan kesejahteraan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).</p> <p>2. Mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olahraga.</p> <p>3. Melestarikan seni dan budaya berbasis kearifan lokal dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.</p> <p>4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak dasar manusia.</p>	<p>1. Pencegahan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).</p> <p>2. Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi olahraga serta penanganan komunitas tertentu.</p> <p>3. Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan olah raga, seni, budaya dan pariwisata.</p> <p>4. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama.</p>

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018

4.2.1 Isu Strategis

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator pembangunan Jawa Barat selama kurun waktu Tahun 2015-2016, dan memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat serta mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis (internal dan eksternal) yang akan dihadapi Jawa Barat pada Tahun 2018, maka terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus, yakni: 1. optimalisasi tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*); 2. prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN maupun RKP Tahun 2018; 3. pengembangan prinsip-prinsip *good governance* dengan mengimplementasikan peraturan pemerintah yang terkait dengan pembagian urusan dan struktur organisasi pemerintah daerah, sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta penyiapan pilkada serentak untuk kabupaten/kota; dan 4. pencapaian indikator misi dan pemenuhan janji gubernur pada saat kampanye yang tertuang pada RPJMD 2013-2018.

Gambar 4.1 menunjukkan keterkaitan antara RPJMN, RPJMD Provinsi dan SDG's.

SANDINGAN RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018 DENGAN RPJMN TAHUN 2015 - 2019		
9 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN (NAWA - ITA)	RPJMD JAWA BARAT 2013-2018	3 FOKUS ALOKASI PADA PRIORITAS RPJMN dan SDGs
<p>C1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara</p> <p>C2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya</p> <p>C3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan</p> <p>C4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya</p> <p>C5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia</p> <p>C6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional</p> <p>C7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik</p> <p>C8. Melakukan revolusi karakter bangsa</p> <p>C9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia</p>	<p>1. CG 1 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan (C5)</p> <p>2. CG 2 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan(C5)</p> <p>3. CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku(C3), (C7)</p> <p>4. CG 4 : Meningkatkan Ekonomi Pertanian (C7)</p> <p>5. CG 5 : Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian (C6)</p> <p>6. CG 6 : Meningkatkan pengelolaan Sumberdaya Alam, lingkungan hidup dan kebencanaan (C7)</p> <p>7. CG 7 : Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan Olahraga (C8), (C9)</p> <p>8. CG 8 : Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan (C5)</p> <p>9. CG 9 : Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Keamanan (C1)</p> <p>10. CG 10 Moderisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan (C2),(C3), (C4)</p>	<p>FOKUS 1 : PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kedaulatan Pangan • Energi • Ketenagalistrikan • Kemaritiman • Pariwisata <p>FOKUS 2 : PEMBANGUNAN KEBUTUHAN DASAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan • Kesehatan • Perumahan <p>17 SDGs</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanpa Kemiskinan 2. Tanpa Kelaparan 3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan 4. Pendidikan Berkualitas 5. Kesteraan Gender 6. Air Bersih dan Sanitasi 7. Energi Bersih dan Terjangkau 8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur 10. Mengurangi Kesenangan 11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas 12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab 13. Aksi Terhadap Iklim 14. Kehidupan Bawah Laut 15. Kehidupan di Darat 16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan <p>FOKUS 3 : PENGURANGAN KESENIANGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antar kelompok • Antar Pendapatan • Antar Wilayah

Gambar 4.2.

Diagram Keterkaitan RPJMN, RPJMD Prov. Jabar dan SDGs

Berdasarkan situasi lingkungan strategis eksternal dan internal serta Delapan Janji Gubernur berikut:

1. Pendidikan Gratis SD, SLTP dan SLTA di Seluruh Jawa Barat.
2. Beasiswa Pendidikan untuk Pemuda, Tenaga Medis, serta keluarga atlet berprestasi dan Guru.
3. Revitaliasi Posyandu dan Dana Operasional Kader Posyandu.
4. Membuka 2 Juta Lapangan Kerja Baru dan Mencetak 100.000 Wirausahaan Baru Jawa Barat.
5. Alokasi 4 Trilyun untuk infrastruktur Desa dan Perdesaan.
6. Rehabilitasi 100.000 Rumah Rakyat Miskin.
7. Pembangunan Pusat Seni dan Budaya Jawa Barat di Kabupaten/Kota.
8. Pembangunan Gelanggang Olah Raga di Kabupaten/Kota.

Dirumuskan 15 (lima belas) isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 yang dikelompokkan berdasarkan rujukan aspek kinerja daerah, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Isu strategis pada aspek kesejahteraan masyarakat, meliputi:
 - 1) Ketahanan pangan;
 - 2) Kemiskinan;
 - 3) Pengangguran; dan
 - 4) Ketahanan keluarga.
- b. Isu strategis pada aspek pelayanan umum, meliputi:
 - 1) Pendidikan;
 - 2) Kesehatan;
 - 3) Infrastruktur;
 - 4) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
- c. Isu strategis pada aspek daya saing daerah, meliputi:
 - 1) Ketenagakerjaan;
 - 2) Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM);
 - 3) Kepemudaan dan Olahraga;
 - 4) Reformasi Birokrasi;

- 5) Kepariwisataaan;
- 6) Kebudayaan;
- 7) Lingkungan hidup dan penataan ruang;

Dengan memperhatikan isu strategis pembangunan Jawa Barat, serta mempertimbangkan tahapan dan capaian target pembangunan RPJMD serta hasil evaluasi kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, maka dirumuskan tema pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 yaitu:

Percepatan Pembangunan Manusia Bagi Upaya Peningkatan Daya Saing Menuju Kemandirian Masyarakat

Mengacu kepada isu strategis dan tema tersebut di atas, maka arah pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 adalah:

- 1) Optimalisasi pencapaian janji Gubernur dan indikator kinerja Daerah RPJMD untuk Tahun 2018;
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar (urusan wajib provinsi); dan
- 3) Optimalisasi pembangunan kewilayahan dan kawasan perbatasan;

Untuk mencapai arah pembangunan tersebut diatas, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan RKPD Tahun 2018 yang diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, seperti pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Strategi dan Arah Kebijakan RKPD Tahun 2018
terhadap RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

No	RPJMD 2013-2018				RKPD 2018		
	Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
1.	Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua	Misi Pertama, Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing	a. Bidang Pendidikan		Bidang Pendidikan		
			1. Menyelenggarakan pendidikan dasar, menengah dan tinggi dengan biaya terjangkau	1. Pendidikan gratis Dasar dan Menengah (SD,SLTP, dan SLTA dalam rangka Penuntasan Wajib Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun pada Tahun 2018. 2. Peningkatan sarana dan kapasitas PAUD, pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan pesantren. 3. Penyediaan beasiswa pendidikan untuk pemuda, tenaga medis, keluarga atlit	1. Menyelenggarakan pendidikan Menengah	1. Pendidikan gratis Menengah 2. Peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan formal dan non formal 3. Pendidikan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah 4. Penyediaan beasiswa untuk pemuda berprestasi	Akses dan kualitas pendidikan serta keagamaan

No	RPJMD 2013-2018				RKPD 2018		
	Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
				berprestasi dan guru serta mahasiswa di PTN/PTS			
			4. Meningkatkan Jumlah dan Kualitas rintisan sekolah standar nasional (RSSN) dan Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang pendidikan menengah	Perwujudan Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) dan Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang pendidikan menengah	2. Meningkatkan Jumlah dan Kualitas rintisan sekolah standar nasional (RSSN) dan Sekolah Standar Nasional (SSN)	Peningkatan jumlah dan kualitas RSSN dan SSN	
			5. Menyelenggarakan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik serta tenaga kependidikan	Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan menengah	3. Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pendidik serta tenaga kependidikan	Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan	

No	RPJMD 2013-2018				RKPD 2018		
	Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
			n jenjang pendidikan menengah				
			b. Bidang Kesehatan		Bidang Kesehatan		
			1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan	Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan	Meningkatkan peran masyarakat dalam penyehatan lingkungan	Pemberdayaan masyarakat melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
			2. Meningkatkan pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, gangguan mental	penguatan pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular gangguan mental serta gizi masyarakat	1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak 2. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	

No	RPJMD 2013-2018				RKPD 2018		
	Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
			serta gangguan gizi				
			3. Memperkuat pembiayaan dan sumber daya kesehatan	Penguatan pembiayaan dan sumber daya kesehatan	3. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan sumber daya kesehatan	Peningkatan kualitas dan kesejahteraan sumber daya kesehatan	
			4. Memperkuat manajemen, regulasi, teknologi informasi kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan	Penguatan manajemen, regulasi, sistem informasi bidang kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan	4. Memperkuat manajemen, regulasi, teknologi informasi dan penelitian bidang kesehatan	Penguatan manajemen, regulasi, sistem informasi dan penelitian bidang kesehatan	
			c. Bidang Ketenagakerjaan		Bidang Ketenagakerjaan		
			1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan daya saing tenaga kerja	1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan daya saing tenaga kerja	Peningkatan iklim investasi dan daya saing usaha

No	RPJMD 2013-2018				RKPD 2018		
	Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
			2. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja	Perlindungan, pengawasan dan memberikan bantuan hukum bagi tenaga kerja Jawa Barat	2. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja	Perlindungan, pengawasan dan memberikan bantuan hukum bagi tenaga kerja	
			3. Perluasan lapangan kerja	1. Peningkatan penempatan tenaga kerja	3. Perluasan lapangan kerja	Peningkatan penempatan tenaga kerja	
				2. Penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat berkebutuhan khusus			
			d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
			1. Meningkatkan keterampilan dalam berwirausaha bagi perempuan	Peningkatan upaya pemberdayaan, pengetahuan, keterampilan dan kemandirian perempuan	1. Meningkatkan perekonomian perempuan dalam keluarga	Peningkatan pemberdayaan, keterampilan dan kemandirian perempuan dalam keluarga	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Manajemen Kependudukan
			2. Mewujudkan	Pemberdayaan	2. Peningkatan	Meningkatkan peran	

No	RPJMD 2013-2018				RKPD 2018		
	Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
			n Pengarusut amaan Gender (PUG) dan meningkatk an pemberday aan perempuan dalam pembangun an	gender/pemberdayaan perempuan	Pengarusuta maan Gender (PUG) dan pemberdayaa n perempuan	perempuan dalam pembangunan	
			3. Mencegah dan menangani perdagangan n perempuan dan anak (<i>trafficking</i>)	Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak (<i>trafficking</i>)	3. Penanganan dan pencegahan perdagangan orang (<i>trafficking</i>), KDRT dan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak (<i>trafficking</i>)	
			4. Mewujudka n Pengarusut amaan Hak-hak Anak	Perwujudan Kota dan Kabupaten di Jawa Barat sebagai Kota Layak Anak	4. Mewujudkan kab/kota aman dan nyaman bagi anak	Perwujudan Kab/Kota Layak Anak	

No	RPJMD 2013-2018				RKPD 2018		
	Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
			(PUHA)				
			e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		
			1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB	Revitalisasi Program Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga	1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta KB	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ber-KB	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Manajemen Kependudukan
			2. Mewujudkan keluarga berkualitas (sehat, sejahtera dan mandiri)	Pengokohan ketahanan keluarga baik ketahanan fisik, ekonomi dan sosial psikologi	2. Mewujudkan keluarga berkualitas (sehat, sejahtera dan mandiri)	Penguatan ketahanan keluarga secara fisik, ekonomi dan sosial psikologi	
2.		Misi Kedua, Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan	a. Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Pekerjaan Umum		
			1. Meningkatkan ekonomi perdesaan	1. Dukungan pembangunan jalan di sentra pertanian, wisata dan industri manufaktur 2. Dukungan sarana irigasi di sentra	Meningkatkan ekonomi perdesaan	1. Penyediaan infrastruktur perdesaan dan infrastruktur strategis di sentra pertanian, wisata, serta industri	Peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan pertanian, perikanan dan kelautan serta

No	RPJMD 2013-2018				RKPD 2018		
	Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
				pertanian lahan sawah		berbasis agro, perikanan dan bisnis kelautan	kehutanan
							Peningkatan kualitas destinasi wisata dan pengembangan seni budaya
			b. Bidang Penataan Ruang		Bidang Penataan Ruang		
			1. Memperkuat ekonomi regional	1. Pengembangan Metropolitan Bodebek Karpur, Metropolitan Bandung Raya, dan Metropolitan Cirebon Raya	1. Meningkatkan pengelolaan pembangunan ekonomi di perkotaan	Pengembangan wilayah di kawasan perkotaan Jawa Barat	Peningkatan iklim investasi dan daya saing usaha
				2. Pengembangan pusat pertumbuhan Pangandaran, Palabuhanratu, dan Rancabuaya	2. Meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi di wilayah selatan Jawa Barat	Pengembangan wilayah berbasis sektor unggulan di pusat pertumbuhan Jawa Barat	Peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan
							Peningkatan

No	RPJMD 2013-2018				RKPD 2018		
	Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
							kualitas destinasi wisata dan pengembangan seni budaya
			c. Bidang Penanaman Modal		Bidang Penanaman Modal		
			1. Meningkatkan investasi daerah	Penciptaan iklim usaha yang kondusif	1. Meningkatkan investasi daerah	Penciptaan iklim usaha yang kondusif	Peningkatan iklim investasi dan daya saing usaha
			2. Meningkatkan produktivitas BUMD dan lembaga keuangan lainnya	Peningkatan peran, kinerja dan daya saing BUMD dalam pengokohan ekonomi Jawa Barat	2. Meningkatkan produktivitas BUMD dan lembaga keuangan	Peningkatan peran, kinerja dan daya saing BUMD dan lembaga keuangan dalam pengokohan ekonomi Jawa Barat	
			d. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
			1. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM	1. Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, serta	Meningkatkan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1. Peningkatan kualitas kelembagaan, Koperasi dan Usaha Kecil	Peningkatan kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan

No	RPJMD 2013-2018				RKPD 2018		
	Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
				perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM 2. Peningkatan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk dan pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM		Menengah Peningkatan perlindungan dan dukungan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Peningkatan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk dan pembiayaan bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Daya Saing Industri
			e. Bidang Ketahanan Pangan		Bidang Pangan		
			1. Meningkatkan ketersediaan, akses pangan masyarakat, kualitas, keragaman dan keamanan pangan	Peningkatan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses dan penganeekaragaman pangan, serta keamanan konsumsi pangan masyarakat dan penanganan daerah rawan pangan	Meningkatkan ketersediaan, akses pangan masyarakat, kualitas, keragaman dan keamanan pangan	Peningkatan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses dan penganeekaragaman pangan	Peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan

No	RPJMD 2013-2018				RKPD 2018		
	Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
			f. Bidang Perikanan dan Kelautan		Bidang Kelautan dan Perikanan		
			1. Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya dan tangkap serta pengelolaan dan pengawasan potensi sumber daya kelautan terutama perikanan komersil di Pantai Selatan dan Pantai Utara melalui	1. Peningkatan produksi perikanan dan kelautan 2. Peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan dan kelautan	1. Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya dan tangkap	Peningkatan produksi, hasil pengolahan dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan pertanian, kelautan dan perikanan serta kehutanan
					2. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan potensi sumber daya kelautan	Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	

No	RPJMD 2013-2018				RKPD 2018		
	Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
			gerakan pengembangan perikanan pantai utara dan pantai selatan (GAPURA)				
			g. Bidang Pertanian		Bidang Pertanian		
			1. Mempertahankan dan menggantikan luas baku lahan sawah yang beralih fungsi dari pertanian ke non pertanian	Pencetakan lahan sawah baru untuk mencapai lahan pertanian berkelanjutan	1. Menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan	1. Penyusunan Survei Investigation Design (SIG)	Peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan pertanian, kelautan dan perikanan serta kehutanan
			2. Meningkatkan produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian,	1. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan 2. Peningkatan		2. Pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan	
					2. Meningkatkan produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan dan	1. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan 2. Peningkatan	

No	RPJMD 2013-2018				RKPD 2018		
	Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
			perkebunan dan peternakan	kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, perkebunan dan peternakan 3. Peningkatan kuantitas pengendalian hama dan penyakit tanaman dan ternak 4. Pengembangan usaha dan sarana prasarana pengolahan serta pemasaran produk pertanian, perkebunan, dan peternakan	peternakan	kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, perkebunan dan peternakan 3. Peningkatan pengendalian hama, penyakit tanaman dan ternak 4. Pengembangan usaha dan sarana prasarana pengolahan, serta pemasaran produk pertanian, perkebunan, dan peternakan	
			h. Bidang Kehutanan		Bidang Kehutanan		
			1. Meningkatkan produktivitas hutan dan pengembangan aneka usaha dan pengembangan aneka usaha	Peningkatan produktivitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	1. Meningkatkan produktivitas hutan dan pengembangan usaha kehutanan	Peningkatan produktivitas hutan dan pengembangan usaha kehutanan Peningkatan pengawasan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar	Peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan

No	RPJMD 2013-2018				RKPD 2018		
	Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
			kehutanan			hutan	
			i. Bidang Perindustrian		Bidang Perindustrian		
			1. Meningkatkan daya saing industri	1. Peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan antar industri	Meningkatkan daya saing industri	1. Peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan antar industri	1. Peningkatan iklim investasi dan daya saing usaha
				2. Peningkatan produksi dan kualitas industri unggulan (industri kreatif, industri telematika, industri agro, industri tekstil dan produk tekstil, industri komponen otomotif serta industri alas kaki)		2. Peningkatan produksi dan kualitas industri unggulan	2. Peningkatan kapasitas Koperasi Usaha Kecil (KUK) dan Daya Saing Industri
			j. Bidang Perdagangan		Bidang Perdagangan		
			1. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang,	1. Peningkatan perdagangan ekspor dan pengembangan pasar luar negeri	1. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang	Peningkatan dan penataan sistem dan jaringan distribusi barang	Peningkatan iklim investasi dan daya saing usaha
				2. Peningkatan	2. Pengembangan	Peningkatan	

No	RPJMD 2013-2018				RKPD 2018		
	Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
			pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional	distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta menata distribusi barang yang efektif dan efisien 3. Penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana dan prasarana perdagangan dan pasar tradisional	n pasar dalam negeri dan luar negeri 3. Perlindungan konsumen dan pasar tradisional	perdagangan ekspor dan pengembangan pasar luar negeri Penggunaan produk dalam negeri, pengembangan dan perlindungan sarana dan prasarana perdagangan dan pasar tradisional	
			k. Bidang Pariwisata		Bidang Pariwisata		
			1. Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan	Pengembangan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya, ziarah) dalam konteks destinasi wisata Jawa-Bali	Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata	Pengembangan pariwisata dan produk wisata	Peningkatan kualitas destinasi wisata dan pengembangan seni budaya

No	RPJMD 2013-2018				RKPD 2018		
	Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
			n daya beli				
3.		Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik.	a. Bidang Perencanaan Pembangunan 1. Meningkatkan kerjasama pembangunan	1. Peningkatan Kerjasama Kemitraan Strategis lintas Provinsi, Pemerintahan Pusat, dan Kabupaten/Kota	Bidang Perencanaan Pembangunan 1. Meningkatkan kerjasama multi sektor dalam pembangunan	Peningkatan Sinergitas serta kemitraan multi pihak antara pusat provinsi kab/kota dan luar negeri	Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK
				1. Peningkatan Kualitas pengelolaan kerjasama Jawa Barat melalui aliansi strategis multi pihak dalam dan luar negeri			
			2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	1. Peningkatan kualitas perencanaan daerah	2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	1. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	

No	RPJMD 2013-2018				RKPD 2018		
	Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
				2. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		2. Peningkatan kontribusi penelitian dalam perencanaan pembangunan daerah	
				2. Peningkatan kualitas penelitian dan riset perencanaan pembangunan daerah			
			b. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil		Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil		
			2. Meningkatkan pengelolaan kependudukan di Jawa Barat	Pengendalian dan penataan kependudukan	Meningkatnya pengelolaan kependudukan	Pengendalian dan penataan kependudukan	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Manajemen Kependudukan
			c. Bidang Komunikasi dan Informatika		Bidang Komunikasi dan Informatika		
			1. Meningkatkan	1. Pengembangan dan	Meningkatkan	Pengembangan dan	Peningkatan

No	RPJMD 2013-2018				RKPD 2018		
	Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
			an kualitas pelayanan dan penerapan informasi	penerapan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan	kualitas pelayanan dan penerapan informasi	penerapan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan menuju <i>cyber province</i>	pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK
				2. Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik menuju <i>cyber province</i>			
			d. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Luar Negeri		Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Luar Negeri		
			1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Hak dan kewajiban politik sebagai warga Negara	1. Peningkatan fungsi partai politik dalam pendidikan politik	1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Hak dan kewajiban politik sebagai warga Negara	1. Peningkatan fungsi partai politik dalam pendidikan politik	Peningkatan kesadaran politik dan hukum
				2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik		2. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan politik dan pemilu	

No	RPJMD 2013-2018				RKPD 2018		
	Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
				3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu			
			2. Memantapkan semangat kebangsaan dan bernegara	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang Ideologi Bangsa dan Negara	2. Memantapkan semangat kebangsaan dan bernegara	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang Ideologi Bangsa dan Negara	
			3. Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1. Peningkatan pembinaan tibumtranmas, satuan perlindungan masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya	3. Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1. Peningkatan pembinaan tibumtranmas, satuan perlindungan masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya	Peningkatan stabilitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
				2. Peningkatan kuantitas dan kualitas Pol PP dan PPNS Se Jawa Barat		2. Peningkatan kuantitas dan kualitas Pol PP dan PPNS Se Jawa Barat	
			e. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan		Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,		

No	RPJMD 2013-2018				RKPD 2018		
	Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
			Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		Administrasi		
			1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif	1. Penataan struktur organisasi yang proporsional	1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK
				2. Peningkatan pelayanan administrasi organisasi	2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah	1. Peningkatan kualitas kinerja aparatur sipil negara dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan bersih	
				3. Penuntasan kejelasan batas administrasi daerah	3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif	2. Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	
				4. Pengaturan		3. Peningkatan	

No	RPJMD 2013-2018				RKPD 2018		
	Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
				pengelolaan keuangan daerah		pengawasan internal untuk mendukung tata kelola dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	
				5. Peningkatan pelayanan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah			
				6. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat			
				7. Peningkatan penerimaan daerah sesuai dengan potensi			
				8. Penataan aset-aset daerah			
				9. Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			
				10. Peningkatan Pengawasan			

No	RPJMD 2013-2018				RKPD 2018		
	Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
				internal untuk mendukung tata kelola dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah			
4.		Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan	a. Bidang Lingkungan Hidup		Bidang Lingkungan Hidup		
			1. Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana	1. Peningkatan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah serta penerapan teknologi bersih untuk industri 2. Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim	1. Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana	1. Peningkatan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah, serta penerapan teknologi bersih pada industri	1. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan 2. Pengurangan dan penanganan resiko bencana
						2. Peningkatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim	
			2. Meningkatkan kualitas dan fungsi kawasan lindung	Peningkatan kualitas pengelolaan kawasan lindung hutan dan non hutan	2. Meningkatkan kualitas dan fungsi kawasan lindung	Peningkatan kualitas pengelolaan kawasan lindung hutan dan non hutan	
			3. Meningkatkan	1. Peningkatan upaya	3. Meningkatkan	Peningkatan	

No	RPJMD 2013-2018				RKPD 2018		
	Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
			an upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup	rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati 2. Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi kawasan pesisir dan laut	n upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup	rehabilitasi hutan dan lahan serta kawasan pesisir dan laut, dan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati	
			b. Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Pekerjaan Umum		
			1. Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang	Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat	Meningkatkan kondisi infrastruktur dasar permukiman dan infrastruktur strategis untuk kesejahteraan dan pemerataan pembangunan ekonomi wilayah	1. Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian	Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan
			2. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi	1. Dukungan Sarana Irigasi di Sentra Pertanian Lahan Sawah 2. Peningkatan konservasi sumber		2. Peningkatan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi,	

No	RPJMD 2013-2018				RKPD 2018		
	Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
			untuk konservasi, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air	daya air 3. Peningkatan pendayagunaan sumber daya air 4. Peningkatan pengendalian daya rusak air 5. Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi		pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air	
			3. Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	1. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air minum 2. Peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik 3. Peningkatan cakupan layanan persampahan 4. Peningkatan ketersediaan drainase perkotaan 5. Pengembangan lingkungan permukiman sehat yang disertai		3. Peningkatan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman	
						4. Peningkatan kualitas sanitasi	

No	RPJMD 2013-2018				RKPD 2018		
	Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
				dengan peningkatan perilaku dan keterlibatan masyarakat untuk peningkatan kualitas sanitasi.			
			c. Bidang Penataan Ruang				
			1. Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan	Peningkatan kinerja perencanaan ruang	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan penataan ruang daerah

No	RPJMD 2013-2018				RKPD 2018		
	Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
			berdaya saing				
			d. Bidang Perumahan				
			1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan	1. Penyediaan rumah untuk rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR)	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan	Penyediaan rumah layak huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR	Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis
				2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap hunian		Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap hunian	
			e. Bidang Perhubungan				
			1. Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan	1. Pengembangan sistem transportasi darat dan perkeretaapian serta sistem transportasi massal (<i>Mass Rapid Transport</i>)	Mengembangkan infrastruktur perhubungan untuk meningkatkan pelayanan pergerakan orang dan barang, serta mengembangkan sistem transportasi	1. Pengembangan sistem transportasi darat, udara, dan perairan	Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis
				2. Pengembangan sistem transportasi udara		2. Pengembangan sistem transportasi massal (<i>Mass</i>	

No	RPJMD 2013-2018				RKPD 2018		
	Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
			pergerakan orang dan barang serta mengembangkan sistem transportasi publik regional yang nyaman		publik regional yang nyaman	<i>Rapid Transport)</i>	
				3. Pengembangan sistem transportasi laut, sungai, danau, dan angkutan perairan lainnya		3. Peningkatan sarana dan prasarana dasar perhubungan	
				4. Peningkatan sarana dan prasarana dasar perhubungan			
			f. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral				
			1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur energi ketenagalistrikan	Meningkatkan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan	Meningkatkan penyediaan infrastruktur energi ketenagalistrikan	Peningkatan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan	Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis
5.		Misi Kelima, Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan	a. Bidang Pemuda dan OlahRaga				
			1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana	Pendukung pembangunan gelanggang olahraga di Kota/Kabupaten	1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana	Pembangunan sarana olah raga di Kabupaten/Kota	Peningkatan peran pemuda dan olahraga

No	RPJMD 2013-2018				RKPD 2018		
	Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
		Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal	olahraga		olahraga		
			2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan	Peningkatan pembinaan olahragawan	2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan	Peningkatan pembinaan olahragawan	
			3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga	3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga	
			4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri	1. Peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan	4. Meningkatkan kualitas aktivitas kepemudaan dalam mewujudkan pemuda mandiri dan kreatif	1. Peningkatan peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan	
				2. Peningkatan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif		2. Peningkatan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif	

No	RPJMD 2013-2018				RKPD 2018		
	Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
			b. Bidang Kebudayaan				
			1. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya daerah	1. Pelestarian dan perlindungan budaya lokal 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pusat gelar karya seni dan budaya	1. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya daerah	Pelestarian dan perlindungan budaya lokal Peningkatan kualitas dan kuantitas pusat gelar karya seni dan budaya.	Peningkatan kualitas pelestarian dan pengembangan seni budaya
			2. Meningkatkan Apresiasi masyarakat terhadap seni dan perfilman daerah	Peningkatan pelestarian dan perlindungan seni dan perfilman daerah	2. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan perfilman daerah	Peningkatkan pelestarian dan perlindungan seni dan perfilman daerah	
			c. Bidang Sosial				
			1. Mencegah timbulnya masalah Kesejahteraan Sosial dan Memberikan Pelayanan	Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial terhadap PMKS dan penghargaan kepada para Perintis Kemerdekaan	1. Mencegah timbulnya masalah Kesejahteraan Sosial. 2. Memberikan pelayanan sosial dan pelayanan	Peningkatan pelayanan sosial dan pelayanan dasar, rehabilitasi sosial, pemberdayaan dan perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin.	Penanggulangan kemiskinan

No	RPJMD 2013-2018				RKPD 2018		
	Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
			Sosial dan memberikan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), melalui sistem panti dan luar panti atau berbasis masyarakat / komuniti, serta bantuan kepada korban bencana dalam meningkatkan keberfungsian sosialnya	Republik Indonesia (PKRI)/ Janda PKRI dan keluarga pahlawan serta terpeliharanya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial	dasar bagi masyarakat tidak mampu.		

No	RPJMD 2013-2018				RKPD 2018		
	Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
			2. Meningkatkan peran dan fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS	Pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS dan pembangunan kesejahteraan sosial	3. Meningkatkan peran dan fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS	Pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS dan pembangunan kesejahteraan sosial	
			d. Bidang Agama				
			1. Meningkatkan kerukunan antar agama dan pemahaman pengamalan agama	1. Meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik antar umat beragama	Meningkatkan kerukunan antar agama melalui pemahaman pengamalan agama, dan peran lembaga sosial	1. Peningkatan kualitas kerukunan hidup antar umat beragama	Peningkatan stabilitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
				2. Peningkatan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat		2. Peningkatan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat	
			2. Meningkatkan peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dan	Penguatan lembaga keagamaan	keagamaan dalam pembangunan	3. Penguatan lembaga keagamaan	

No	RPJMD 2013-2018				RKPD 2018		
	Visi	Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
			lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan				

Keberhasilan pembangunan Jawa Barat perlu dilaksanakan berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, dan didukung oleh beberapa inovasi perencanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan prioritas pembangunan Jawa Barat Tahun 2018 dirumuskan melalui pendekatan perencanaan *people centered development*, holistik-tematik, terintegrasi, dan spasial.

- *People centered development* dimaknai bahwa pada dasarnya manusia sebagai pusat pembangunan, baik sebagai subjek maupun objek. Seluruh program/kegiatan diarahkan pada upaya peningkatan peran manusia sebagai subjek pembangunan sekaligus fokus pada upaya pencapaian hasil pembangunan manusianya. Dalam rangka memastikan konvergensi fokus dan lokus sasaran program/kegiatan pembangunan yang masih makro indikatif dilakukan proses “pengerucutan” menuju data mikro definitif, melalui upaya pemanfaatan beberapa sumber data mikro statik bagi perencanaan pembangunan, seperti: Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2008, Sensus Penduduk 2010, PPLS Tahun 2011, Potensi Desa Tahun 2014, dan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2014. Sejalan dengan urgensi kecepatan (*speed*) dan ketepatan (*power*) sasaran pembangunan maka saat ini mulai dimanfaatkan beberapa data mikro dinamik yang *realtime*, seperti Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK). Sebuah keniscayaan, bahwa sasaran “tembak” perencanaan tidak hanya yang bersifat *long-term*, *middle-term* tetapi ada juga yang *short-term*. Sama juga halnya, bahwa sasaran pembangunan bukan saja kantong, kelompok masyarakat atau komunitas, tetapi juga individu.
- Holistik-tematik dimaknai bahwa prioritas pembangunan telah mempertimbangkan berbagai kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi, rujukan pembangunan berkelanjutan, guna

membangun pondasi dan payung bagi aktivitas multi pelaku secara luas, dan diarahkan untuk menjawab tuntutan kinerja pemerintah daerah.

- Terintegrasi dimaknai bahwa sasaran prioritas pembangunan harus bisa dicapai melalui sinergi lintas pelaku berbasis Rencana Aksi Multipihak Implementasi Pekerjaan (RAM-IP). Prioritas pembangunan merupakan hasil konsolidasi dan pemetaan program/kegiatan substansial yang akan dikerjakan oleh OPD dan bersifat akomodatif terhadap proses perubahan kewenangan.
 - Spasial dimaknai bahwa aspek lokasi/kewilayahan telah dipertimbangkan dalam penetapan prioritas pembangunan melalui pendekatan berbasis tata ruang dan analisis kebutuhan. Lokus sasaran perencanaan ditentukan secara definitif sejak awal melalui analisis terpilah dengan segenap variabel pendukung yang relevan. Penentuan lokus ditetapkan berdasarkan kriteria tingkat urgensi, cakupan, atau keterparahan.
2. Dalam penyelenggaraan proses Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) untuk menyepakati prioritas pembangunan Tahun 2018 ditunjang dengan melaksanakan Virtual Musrenbang. Virtual Musrenbang merupakan dialog interaktif melalui media *teleconference* antara Gubernur dengan Bupati dan Walikota se-Jawa Barat dan disaksikan secara langsung oleh pimpinan DPRD, unsur forum komunikasi pimpinan daerah serta elemen masyarakat. Keunggulan dari Virtual Musrenbang ini, antara lain meningkatkan keterpaduan holistisitas-tematik perencanaan, meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi peserta *teleconference*, menghemat anggaran, serta menunjang akuntabilitas perencanaan pembangunan melalui proses dokumentasi secara audio-visual dan digital.
 3. Dalam menetapkan prioritas pembangunan untuk sasaran penanggulangan kemiskinan, Provinsi Jawa Barat telah mengembangkan *Decision Support System* (Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan) yang memiliki fungsi pencarian dan analisis

terkait data rumah tangga miskin di Jawa Barat. Sistem ini diberi nama *Seeker and Analyzer Pro Poor/SAAPP*, yang merupakan pengembangan dari sistem aplikasi terdahulu, yakni KM) Pro-Poor.

4.2.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 merupakan agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan dari isu strategis yang diselaraskan dengan sasaran misi RPJMD tahun berjalan, berkorelasi dengan pencapaian prioritas pembangunan nasional (RKP), berkorelasi terhadap sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah, serta berkorelasi terhadap pencapaian kebijakan 10 *Common Goals*, Tematik Kewilayahan, Tematik Perbatasan, dan Pengembangan Wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat.

Prioritas pembangunan tersebut digambarkan melalui diagram skematis yang menunjukkan urutan proses dari setiap prioritas pembangunan sampai dengan indikasi kegiatan prioritas. Untuk menetapkan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan metode pembobotan untuk menentukan skor terhadap masing-masing kriteria, berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu : (1) prioritas janji politik yang perlu diwujudkan (janji Gubernur), skor: 25; (2) memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional (RKP Tahun 2018), skor: 20; (3) dampak yang ditimbulkannya terhadap publik, skor: 20; (4) kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani, skor : 15; (5) memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah, skor: 10; dan (6) merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah, skor:10.

Berdasarkan hasil pembobotan dari 14 isu strategis, maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

2018 sebagai berikut:

1. *Akses dan kualitas pendidikan serta keagamaan, dengan sasaran :*
 - a. Wajib belajar 12 tahun.
 - b. Pendidikan Vokasional.
 - c. Penyelenggaraan pendidikan khusus (SLB) dan Pendidikan Inklusif.
 - d. Meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan guru.
 - e. Penyelenggaraan Program Studi Di luar Kampus Utama (PSDKU)/Multikampus.
 - f. Peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan menengah.
 - g. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga di Jawa Barat
 - h. Peningkatan sarana dan prasarana pusat seni dan budaya di Jawa Barat.
 - i. Meningkatnya akses dan kualitas keagamaan.

2. *Akses dan kualitas pelayanan kesehatan, dengan sasaran :*
 - a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak.
 - b. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular.
 - c. Peningkatan kesehatan lingkungan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 - d. Peningkatan kualitas, kuantitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
 - e. Dukungan pembiayaan kesehatan secara tepat sasaran dan tepat guna

3. *Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan, dengan sasaran :*
 - a. Meningkatnya jumlah cakupan layanan air bersih dan sanitasi,
 - b. Meningkatnya jumlah cakupan layanan pengelolaan sampah perkotaan regional.
 - c. Meningkatnya jumlah rumah layak huni serta meningkatnya

kualitas lingkungan perumahan.

d. Meningkatnya kondisi dan capaian infrastruktur jalan dan perhubungan.

4. *Peningkatan iklim investasi, daya saing usaha dan pariwisata, dengan sasaran :*

- a. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi.
- b. Meningkatnya jumlah serapan angkatan kerja.
- c. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat keahlian.
- d. Meningkatnya mutu, desain produk dan pemasaran usaha.
- e. Mengembangkan pariwisata dan perlindungan budaya lokal.

5. *Peningkatan ketahanan pangan, energi dan sumber daya air, dengan sasaran :*

- a. Tersedianya cadangan pangan yang memadai dan pemenuhan protein hewani.
- b. Meningkatkan distribusi, informasi harga dan akses pangan.
- c. Meningkatnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.
- d. Meningkatnya kelembagaan dan kompetensi sumber daya tenaga penyuluh yang berorientasi agribisnis.
- e. Meningkatnya produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan nonkayu, kelautan dan perikanan.
- f. Meningkatnya jumlah cakupan listrik rumah tangga.
- g. Meningkatnya kondisi dan cakupan pelayanan infrastruktur irigasi.
- h. Meningkatnya ketersediaan dan pelayanan air baku.
- i. Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

6. *Peningkatan kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) dan Daya Saing Industri, dengan sasaran :*

- a. Meningkatnya akses terhadap modal, pemasaran dan fungsi intermediasi perbankan.
 - b. Pemanfaatan teknologi tepat guna semakin berkembang.
 - c. Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan.
 - d. Industri manufaktur dan industri kreatif semakin berkembang.
7. *Politik Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan, dengan sasaran :*
- a. Peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*).
 - b. Peningkatan pelayanan public dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis TIK.
 - c. Peningkatan kesadaran hokum antar umat beragama
 - d. Dukungan dan fasilitasi pilkada yang langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER) dan Jujur Adil
8. *Pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, dengan sasaran :*
- a. Meningkatnya penanganan rehabilitasi lahan kritis serta konservasi air, hutan dan lahan.
 - b. Menurunnya tingkat pencemaran air, udara, dan tanah.
 - c. Meningkatnya upaya penanggulangan bencana.
9. *Penanggulangan kemiskinan, dengan sasaran :*
- a. Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan.
 - b. Penciptaan lapang kerja dengan memperbesar investasi padat karya
 - c. Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil
 - d. Perluasan Pelayanan Dasar
10. *Peningkatan penataan ruang daerah, dengan sasaran :*
- a. Meningkatnya kualitas perencanaan ruang.
 - b. Meningkatnya konsistensi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.
 - c. Meningkatnya kualitas pengendalian pemanfaatan.

11. *Peningkatan Kualitas kependudukan, dengan sasaran :*
- a. Meningkatnya ketahanan keluarga.
 - b. Terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG).
 - c. Pengendalian Kuantitas dan Mobilitas Kependudukan.

Pembangunan Jawa Barat Tahun 2018 tidak terlepas dari arah dan kebijakan nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2018, untuk itu dalam rumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 telah bersinergi dengan prioritas nasional sebagaimana pada Tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

RKP Tahun 2018		RKPD Tahun 2018			
Prioritas Pembangunan Nasional	Arah kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Sasaran Prioritas Pembangunan
1. Dimensi pembangunan manusia					
1.1 Revolusi mental	Penegakan hukum dan kelembagaan politik	Menata sistem hukum di daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan 2. Peningkatan Penyelarasan peraturan daerah 3. Peningkatan sinergitas penanganan perkara dengan 	Peningkatan kesadaran politik dan hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kesadaran Hukum 2. Meningkatnya karakter etika budaya politik demokrasi madani bagi masyarakat 3. Meningkatnya kualitas wawasan kebangsaan dan ideologi bangsa

RKP Tahun 2018		RKPD Tahun 2018			
			lembaga lainnya		
	Reformasi birokrasi pemerintahan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan administrasi organisasi 2. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 3. Peningkatan Pengawasan internal untuk mendukung tata kelola dan kinerja 	Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (<i>clean governance</i>) 2. Meningkatnya kinerja Aparatur Sipil Negara 3. Meningkatnya pelayanan data dan informasi kepada masyarakat berbasis IPTEK
1.2 Pembangunan Pendidikan	1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan	Menyelenggarakan pendidikan dasar,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan gratis menengah 2. Peningkatan sarana 	Akses dan kualitas pendidikan serta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib belajar 12 tahun. 2. Pendidikan Vokasional.

RKP Tahun 2018		RKPD Tahun 2018			
	<p>pendidikan dasar, serta memperluas dan meningkatkan pemerataan, akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah</p> <p>2. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan pengembangan</p> <p>3. Kurikulum dan pelaksanaannya, serta penguatan sistem penilaian pendidikan yang</p>	<p>menengah dan tinggi</p> <p>Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pendidik serta tenaga kependidikan</p>	<p>dan kapasitas pendidikan formal dan non formal</p> <p>3. Pendidikan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah</p> <p>4. Penyediaan beasiswa untuk pemuda berprestasi</p>	keagamaan	<p>3. Penyelenggaraan pendidikan khusus (SLB) dan Pendidikan Inklusif.</p> <p>4. Meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan guru pendidikan menengah</p> <p>5. Penyelenggaraan Program Studi di luar Kampus Utama (PSDKU)/Multikampus</p> <p>6. Peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan menengah</p> <p>7. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan</p>

RKP Tahun 2018		RKPD Tahun 2018			
	<p>komprehensif dan kredibel</p> <p>4. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan dan penempatan guru</p> <p>5. Revitalisasi LPTK secara menyeluruh untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan</p> <p>6. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja</p>				

RKP Tahun 2018		RKPD Tahun 2018			
1.3 Pembangunan Kesehatan	1. Memperkuat upaya promotif dan preventif	Meningkatkan pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, gangguan mental dan gizi	Peningkatan pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, gangguan mental dan gizi	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	<p>a. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan ibu dan anak.</p> <p>b. Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular.</p> <p>c. <i>Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).</i></p> <p>d. Meningkatnya</p>
	2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Meningkatkan pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, gangguan mental dan gizi	Peningkatan pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, gangguan mental dan gizi		

RKP Tahun 2018		RKPD Tahun 2018			
					kualitas, kuantitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
1.4 Pembangunan perumahan dan permukiman	<p>1. Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai</p> <p>2. Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan perubahan sikap dan</p>	Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Peningkatan cakupan pelayanan infrastruktur dasar	<p>1. Meningkatkan jumlah cakupan listrik rumah tangga</p> <p>2. Meningkatkan jumlah cakupan layanan air bersih dan sanitasi</p> <p>3. Meningkatkan jumlah cakupan layanan pengelolaan sampah perkotaan regional</p> <p>4. Meningkatkan jumlah</p>	1. Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan

RKP Tahun 2018		RKPD Tahun 2018			
	perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi 3. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan masyarakat 4. Peningkatan Efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi			rumah layak huni serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan	
2. Dimensi pembangunan sektor unggulan					
2.1 Kedaulatan pangan	1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui	1. Meningkatkan ketersediaan,	1. Peningkatan ketersediaan, penguatan	1. Peningkatan ketahanan	1. Terwujudnya pengelolaan lahan pertanian yang

RKP Tahun 2018		RKPD Tahun 2018			
	kapasitas produksi: padi	akses pangan masyarakat, kualitas, keragaman dan keamanan pangan	cadangan, distribusi, akses dan penganekeagaman pangan	pangan, pengelolaan pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan	berkelanjutan 2. Meningkatkan kelembagaan dan kompetensi sumber daya tenaga penyuluh 3. Meningkatnya produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan
	2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan	2. Meningkatkan ketersediaan, akses pangan masyarakat, kualitas, keragaman dan keamanan pangan	2. Peningkatan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses dan penganekeagaman pangan	2. Peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan	1. Tersedianya cadangan pangan yang memadai
2.2 Pembangunan Kedaualatan Energi	1. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi	Mengembangkan sumber energi baru terbarukan dan konservasi	Pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan	Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya	Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan

RKP Tahun 2018		RKPD Tahun 2018			
		energi, sumber daya mineral, geologi dan air tanah		dukung dan daya tampung lingkungan	
2.3 Pembangu n an Kemaritim an dan Kelautan	Percepatan pengembangan ekonomi kelautan	1. Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya dan tangkap 2. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan potensi sumber daya kelautan	1. Peningkatan produksi, hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan dan kelautan 2. Pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan	Peningkata n ketahanan pangan, pengelolaa n pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan	Meningkatnya produksi dan pengolahan hasil perikanan, budidaya dan tangkap serta pengelolaan dan pengawasan potensi sumber daya kelautan
2.4 Pembangu nan Pariwisata	1. Pembangunan Destinasi Pariwisata	1. Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata	1. Pengembang an pariwisata dan produk wisata	1. Peningkata n kualitas destinasi wisata dan pengemba ngan seni	1. Terwujudnya kualitas sarana dan prasarana pariwisata, seni dan budaya 2. Meningkatnya promosi pariwisata, seni, dan

RKP Tahun 2018		RKPD Tahun 2018			
				budaya	budaya 3. Meningkatkan SDM pariwisata, seni dan budaya yang berkualitas
2.5 Pembangunan Industri/KEK	Peningkatan daya saing dan produktivitas	Meningkatkan daya saing industri	1. Peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan antar industri 2. Peningkatan produksi dan kualitas industri unggulan	Peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dan Daya Saing Industri	Industri manufaktur dan industri kreatif semakin berkembang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal	Peningkatan kemudahan dan percepatan pelayanan perijinan investasi	Meningkatkan investasi daerah	Penciptaan iklim usaha yang kondusif	Peningkatan iklim investasi dan daya saing usaha	1. Proses perijinan usaha semakin cepat 2. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
3.1 Pemerataan	Mendorong aktivitas ekonomi	Perluasan	Peningkatan penempatan	Peningkatan kapasitas	Akses kesempatan kerja

RKP Tahun 2018		RKPD Tahun 2018			
n antar Kelompok Pendapat	untuk menghasilkan kesempatan kerja dan usaha yang lebih luas	lapangan kerja	tenaga kerja	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dan Daya Saing	semakin luas
	Pengembangan ekonomi produktif	Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM	Peningkatan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk dan pembiayaan bagi KUMKM	Peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dan Daya Saing	Meningkatnya akses terhadap modal, pemasaran dan fungsi intermediasi perbankan
3.3 Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan/trasmi grasi yang menuju klasterisasi permukiman	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan	Penyediaan rumah layak huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR	Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah cakupan listrik rumah tangga 2. Meningkatnya jumlah cakupan layanan air bersih dan sanitasi 3. Meningkatnya jumlah rumah layak huni serta meningkatnya kualitas lingkungan perumahan
3.4 Pembangunan	Reformasi	1. Meningkatkan kualitas	1. Peningkatan sarana dan	Peningkatan pelayanan	1. Meningkatnya penyelenggaraan

RKP Tahun 2018		RKPD Tahun 2018			
Polhukhan kam	Birokrasi	<p>sarana dan prasarana pelayanan publik</p> <p>2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah</p>	<p>prasarana pelayanan publik</p> <p>2. Peningkatan kualitas kinerja aparatur sipil negara dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan bersih</p>	<p>publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK</p>	<p>pemerintahan yang bersih (<i>clean governance</i>)</p> <p>2. Meningkatnya kinerja Aparatur Sipil Negara</p> <p>3. Meningkatnya pelayanan data dan informasi kepada masyarakat berbasis IPTEK</p>

4.3. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas/fungsi OPD/Biro dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan diperoleh dari program prioritas dan program yang mendukung Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) OPD/Biro. Untuk mencapai visi dan misi RPJMD Jawa Barat Tahun 2013-2018 yang diterjemahkan melalui 11 prioritas pembangunan Jawa Barat Tahun 2018, dan 113 program pembangunan daerah, yang terbagi ke dalam 26 urusan wajib dan 9 urusan pilihan. Program tersebut digunakan untuk memayungi dan mengoptimalkan pelaksanaan prioritas pembangunan Tahun 2018 yang menjadi urusan kewenangan Provinsi, sekaligus menjalankan fungsi manajemen pemerintahan Provinsi diluar prioritas pembangunan 2018, yang dijabarkan sebagai berikut:

A. URUSAN WAJIB

I. Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- a. Program pendidikan menengah
- b. Program pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus
- c. Program pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan
- d. Program penyelenggaraan unsur manajemen dan fungsi manajemen
- e. Program pembinaan bahasa dan sastra

2. Kesehatan

- a. Program promosi kesehatan
- b. Program pengembangan lingkungan sehat
- c. Program pelayanan kesehatan
- d. Program pengendalian penyakit menular dan tidak menular
- e. Program sumber daya kesehatan
- f. Program manajemen kesehatan

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang

- a. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
- c. Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan
- d. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
- e. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
- f. Program pengendalian banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai
- g. Program pembinaan jasa konstruksi
- h. Program pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan
- i. Program penataan ruang
- j. Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman

- a. Program pengembangan perumahan

5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

- a. Program pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- b. Program pendidikan politik masyarakat
- c. Program penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan perlindungan masyarakat

6. Sosial

- a. Program pelayanan dan rehabilitasi sosial
- b. Program pemberdayaan sosial
- c. Program perlindungan dan jaminan sosial
- d. Program pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

II. Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga kerja

- a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
- b. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
- c. Program peningkatan kesempatan kerja

2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- a. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- b. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

3. Pangan

- a. Program peningkatan ketahanan pangan

4. Pertanahan

- a. Program pengadaan, penataan dan pengendalian administrasi pertanahan

5. Lingkungan hidup

- a. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- b. Program pengelolaan kawasan lindung
- c. Program rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
- d. Program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

- a. Program penataan administrasi kependudukan

7. Pemberdayaan masyarakat dan desa

- a. Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat
- b. Program pemantapan pemerintahan dan pembangunan desa
- c. Program peningkatan infrastruktur perdesaan
- d. Program peningkatan dan pembinaan peran serta masyarakat dalam pembangunan

8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

- a. Program ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga
- b. Program pelayanan keluarga berencana

9. Perhubungan

- a. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
- b. Program peningkatan pelayanan angkutan
- c. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
- d. Program peningkatan kelayakan kendaraan bermotor
- e. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan (LLAJ)

10. Komunikasi dan informatika

- a. Program pengembangan komunikasi, informasi, media massa dan pemanfaatan teknologi informasi

11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah

- a. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha kecil menengah
- b. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
- c. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
- d. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

12. Penanaman modal

- a. Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan
- b. Program Peningkatan Investasi Daerah
- c. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

13. Kepemudaan dan olah raga

- a. Program peningkatan dan pembinaan kepemudaan dan kepramukaan
- b. Program pembinaan, pemasyarakatan dan pengembangan olah raga

14. Statistik

- a. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

15. Persandian

- a. Program penyelenggaraan persandian daerah

16. Kebudayaan

- a. Program pengembangan nilai budaya
- b. Program pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya

17. Perpustakaan

- a. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

18. Kearsipan

- a. Program pengembangan kearsipan

B. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan perikanan

- a. Program pengembangan budidaya perikanan
- b. Program pengembangan perikanan tangkap
- c. Program pemberdayaan sumberdaya kelautan dan perikanan
- d. Program pemasaran, pengolahan dan peningkatan mutu hasil

kelautan dan perikanan

- e. Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
- f. Program pengelolaan dan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan

2. Pariwisata

- a. Program pengembangan destinasi pariwisata
- b. Program pengembangan pemasaran pariwisata

3. Pertanian

- a. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- b. Program pemberdayaan sumber daya pertanian/perkebunan
- c. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tanaman
- d. Program pemasaran dan pengolahan hasil pertanian/perkebunan
- e. Program peningkatan produksi hasil peternakan
- f. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- g. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

4. Kehutanan

- a. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
- b. Program penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan

5. Energi dan sumber daya mineral

- a. Program pembinaan, pengembangan sumber daya mineral, geologi dan air tanah
- b. Program pembinaan, pengembangan ketenagalistrikan dan pemanfaatan energy

6. Perdagangan

- a. Program perdagangan dalam negeri
- b. Program pemberdayaan konsumen dan pengawasan barang beredar dan jasa

- c. Program pengembangan perdagangan luar negeri

7. Perindustrian

- a. Program pengembangan industri
- b. Program penataan struktur industri
- c. Program peningkatan kemampuan teknologi industry

8. Transmigrasi

- a. Program pengembangan transmigrasi

C. Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

- a. Program penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sistem administrasi daerah
- b. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
- c. Program kerjasama pembangunan

2. Keuangan

- a. Program pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
- b. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan

- a. Program pengembangan kompetensi aparatur
- b. Program peningkatan kesejahteraan sumber daya aparatur
- c. Program pembinaan dan pengembangan aparatur

4. Penelitian dan Pengembangan

- a. Program penelitian, studi, dan survei

5. Fungsi Lain

- a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

- b. Program pengendalian dan pengawasan
- c. Program penataan peraturan perundang-undangan, kesadaran hukum dan HAM
- d. Program pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
- e. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- f. Program pelayanan administrasi perkantoran

Program pembangunan tersebut di atas selanjutnya dirumuskan keterkaitannya antara prioritas pembangunan Tahun 2018, program prioritas pembangunan dan kegiatan prioritas, yang merupakan program unggulan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dijabarkan pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Prioritas Pembangunan, Sasaran/Program Prioritas, dan Kegiatan
Prioritas RKPD Tahun 2018

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2018	Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikasi Kegiatan
1.	Akses dan kualitas pendidikan serta keagamaan	1) Wajib belajar 12 tahun	1. Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB 2. Bantuan Pendidikan Menengah Universal (PMU) 3. Rehabilitasi Bangunan Sekolah 4. Penyediaan bantuan bagi keluarga tidak mampu
		2) Pendidikan vokasional	1. Penguatan kemitraan dunia usaha /dunia industri (DUDI) 2. Peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan vokasi 3. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan vokasi yang berkualitas 4. Peningkatan kualitas guru vokasi
		3) Penyelenggaraan pendidikan khusus (SLB) dan pendidikan inklusif	1. Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan Khusus (SLB) 2. Penyelenggaraan pendidikan inklusif yang berkualitas 3. Pemberian beasiswa bagi siswa SLB 4. Peningkatan kualitas guru SLB
		4) Meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan guru pendidikan menengah	1. Peningkatan profesionalisme guru pendidikan menengah 2. Pengelolaan dan distribusi guru pendidikan menengah PNS dan Non PNS 3. Pemberian beasiswa pendidikan tinggi bagi guru pendidikan menengah
		5) Penyelenggaraan Program Studi di luar Kampus	1. Dukungan biaya operasional penyelenggaraan

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2018	Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikasi Kegiatan
		Utama (PSDKU)/Multikampus	PSDKU/Multikampus 2. Dukungan biaya kampus permanen 3. Pemberian beasiswa perguruan tinggi bagi mahasiswa asal Jawa Barat
		6) Peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan menengah	1. Penyelenggaraan pendidikan menengah berbasis pesantren 2. Penyelenggaraan pilot project sekolah unggul 3. Peningkatan jumlah sekolah berstandar nasional 4. Peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan menengah 5. Pemenuhan sarana prasarana laboratorium pendidikan menengah yang berkualitas
		7) Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan	1. Pembangunan pembangunan sarana peribadatan yang berkualitas 2. Pemberian insentif guru madrasah 3. Pembangunan Kobong
2.	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	1) Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak.	1. Penguatan rumah sakit milik Provinsi 2. Penguatan sistem rujukan berbasis sistem regionalisasi 3. Perluasan pelayanan kesehatan bagi penduduk di daerah terpencil/sulit dijangkau atau rawan bencana 4. Regulasi untuk akses pelayanan kesehatan lintas batas bagi masyarakat luar daerah/Provinsi
		1) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	1. Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 2. Pelaksanaan upaya preventif dan promosi kesehatan

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2018	Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikasi Kegiatan
			3. Pelaksanaan surveillance epidemiologi secara berkala dan penanggulangan KLB
		2) Meningkatnya kesehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standarisasi dan sertifikasi bagi tenaga kesehatan yang bekerja di Jawa Barat 2. Penguatan kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan dalam pengadaan dan pendayagunaan tenaga strategis, spesialis/sub spesialis 3. Mendorong Kabupaten/Kota untuk memiliki kebijakan PHBS Mendorong Kabupaten/Kota untuk memiliki kebijakan PHBS 4. Penguatan peranan pemerintah desa dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat 5. Penguatan dan pembinaan sarana upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) 6. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam wirausaha sanitasi
		3) Meningkatnya kualitas, kuantitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan surveilans penyakit dan masalah kesehatan berbasis masyarakat (Community Base Surveillance) 2. Pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
		4) Meningkatnya pembiayaan kesehatan secara tepat sasaran dan tepat guna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pembiayaan menggunakan "health accounts" baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota 2. Penguatan regulasi mekanisme penggunaan dana jaminan kesehatan Provinsi bagi masyarakat

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2018	Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikasi Kegiatan
			non PBI 3. Penguatan pembiayaan penelitian dan pengembangan IPTEK kesehatan secara berkelanjutan
3.	Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan	1) Meningkatnya jumlah cakupan layanan air bersih dan sanitasi	1. Pembangunan jaringan air bersih/air minum 2. Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih Sehat 3. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 4. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 5. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional di wilayah Metropolitan 6. Pembangunan IPAL Regional di wilayah Metropolitan
		2) Meningkatnya jumlah cakupan layanan pengelolaan sampah perkotaan regional	1. Pembangunan TPPAS Legok Nangka 2. Pembangunan TPPAS Nambo 3. Operasionalisasi TPA Sarimukti 4. Perencanaan TPPAS Regional Ciayumajakuning
		3) Meningkatnya jumlah rumah layak huni serta meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	1. Penanganan Kawasan Kumuh 2. Pembangunan Rutilahu Perkotaan ; 3. Pembangunan Rutilahu Perdesaan
		4) Meningkatnya kondisi dan capaian infrastruktur jalan dan perhubungan	1. Pembangunan dan Pengelolaan pelabuhan regional 2. Penyediaan fasilitas lalu lintas 3. Penanganan Perkeretaapian lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi 4. Penyelenggaraan Jalan

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2018	Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikasi Kegiatan
			Provinsi 5. Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) 6. Pengelolaan terminal tipe B 7. Pembangunan Jalan Lintas Cepat Strategis
4.	Peningkatan iklim investasi, daya saing usaha dan pariwisata	1) Meningkatnya kualitas iklim usaha dan mutu pelayanan realisasi investasi.	1. Fasilitasi kegiatan formalisasi badan usaha 2. pemberian fasilitasi pengamanan kawasan usaha 3. koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
		2) Meningkatnya jumlah serapan angkatan kerja	1. penyusunan informasi bursa tenaga kerja 2. penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 3. kerjasama pendidikan dan pelatihan 4. pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 5. pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan, pelatihan berbasis masyarakat 6. penyiapan tenaga kerja siap pakai
		3) Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat keahlian.	1. pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 2. penyiapan tenaga kerja siap pakai 3. pembangunan dan peningkatan balai pelatihan kerja 4. peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK
		4) Meningkatnya mutu, desain produk dan pemasaran	1. peningkatan kualitas design produk 2. peningkatan keterampilan yang dikerjasamakan

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2018	Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikasi Kegiatan
		usaha.	dengan pihak profesional 3. penerapan standarisasi mutu produk 4. fasilitasi promosi produk
		5) Mengembangkan pariwisata dan perlindungan budaya lokal.	1. pengembangan objek pariwisata unggulan 2. pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata 3. peningkatan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 4. pengelolaan dan pengakuan hak kekayaan intelektual (HKI) di bidang seni dan budaya 5. pengelolaan keragaman dan kekayaan budidaya
5.	Peningkatan ketahanan pangan, energi dan sumberdaya air	1) Tersedianya cadangan pangan yang memadai	1. Penyediaan cadangan pangan daerah 2. Penyediaan lumbung pangan desa 3. Desa Mandiri Pangan
		2) Meningkatnya Distribusi, Informasi Harga dan Akses Pangan	1. Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan 2. Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat 3. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien
		3) Terwujudnya pengawasan dan pembinaan Keamanan Pangan	1. Peningkatan mutu dan keamanan pangan 2. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
		4) Meningkatnya kelembagaan dan kompetensi sumber daya tenaga penyuluh	1. Peningkatan Kuantitas Ketenagaan Penyuluh 2. Peningkatan kesejahteraan ketenagaan penyuluh 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana ketenagaan Penyuluh 5. Koordinasi Ketenagaan Penyuluh
		5) Meningkatnya	1. Pengembangan benih/bibit

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2018	Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikasi Kegiatan
		<p>produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan</p>	<p>unggulan bersertifikat dan pelestarian plasma nutfah</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengembangan pertanian pada lahan kering 3. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditi pertanian, perkebunan dan peternaka. 4. Pemberdayaan sumber daya dan kelembagaan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 5. Pencegahan dan penanggulangan penyakit tanaman dan ternak 6. Pengembangan induk dan benih ikan unggul 7. Pembinaan dan pengembangan perikanan 8. Pengembangan pelabuhan perikanan 9. Peningkatan konsumsi ikan 10. Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 11. Pengembangan pemuliaan ikan serta perbaikan genetika 12. Pengembangan dan peningkatan penerapan teknologi perikanan 13. Restocking di perairan umum 14. Pembinaan, pengujian, serta pengawasan jaminan mutu hasil produksi kelautan dan perikanan 15. Peningkatan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan 16. Peningkatan pelestarian dan pemulihan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil 17. Pelestarian perairan umum

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2018	Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikasi Kegiatan
		6) Meningkatkan jumlah cakupan listrik rumah tangga.	<ul style="list-style-type: none"> b. Pemasangan sambungan rumah listrik c. Pemasangan jaringan instalasi listrik d. Pembangunan Jaringan listrik tegangan rendah
		7) Meningkatkan kondisi dan cakupan pelayanan infrastruktur irigasi.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Jaringan Irigasi pada 6 Wilayah Sungai di Jawa Barat 2. Peningkatan jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani dan Irigasi Desa 3. Dukungan DAK Rehabilitasi Jaringan Irigasi 4. Perencanaan Detail Rehab Jaringan Irigasi 5. Pemantauan dan Pengembangan Potensi O & P Jaringan Irigasi di Jawa Barat 6. Pembangunan Daerah Irigasi Baru
		8) Meningkatkan ketersediaan dan pelayanan air baku.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Waduk, Bendung, Situ, dan Embung sebagai penyedia air baku; 2. Pengelolaan Situ di 6 Wilayah Sungai; 3. Survey investigasi rekayasa teknik Sumber Daya Air
		9) Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan biogas 2. Pembangunan PLTMH 3. Pemanfaatan Kohe untuk pemanfaatan energi rumah tangga
6.	Peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (KUKM) dan Daya Saing Industri	1) Meningkatkan akses terhadap modal, pemasaran dan fungsi intermediasi perbankan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan pendampingan modal usaha 2. Peningkatan pengembangan teknis substansif 3. Peningkatan pengembangan koperasi 4. Penguatan tatakelola kelembagaan koperasi 5. Pengembangan jaringan

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2018	Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikasi Kegiatan
			dan akses pasar KUKM
		2) Pemanfaatan teknologi tepat guna semakin berkembang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan teknologi tepat guna 2. Pengembangan jaringan kerjasama bagu KUKM 3. Promosi produk KUKM 4. Pengembangan sistem informasi Usaha
		3) Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan strategi wirausahawan 2. Pelatihan manajemen keuangan 3. Peningkatan pelatihan bagi wirausaha
		4) Industri manufaktur dan industri kreatif semakin berkembang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan kemampuan, pengembangan dan pelayanan teknologi industri 2. Penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur 3. Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur 4. Potensi Industri penunjang industri kecil dan menengah 5. Penyelenggaraan Kerjasama Industri
7.	Politik hukum dan Tata Kelola Pemerintahan	1) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean governance)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan Kerjasama Intelejen dalam Pencegahan Konflik Sosial dan Terorisme 2. Pengawasan Orang Asing di Jawa Barat 3. Forum Komunikasi Masyarakat dalam pencegahan konflik 4. Pemetaan situasi dan kondisi konflik sosial di daerah
		2) Meningkatnya kesadaran hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Kamtibmas dan Penegakan Perda Terpadu di Perbatasan Provinsi Kabupaten/Kota 2. Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2018	Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikasi Kegiatan
			3. Peningkatan Kamtibtranmas dengan unsur POLRI, TNI dan Satpol PP Kabupaten/Kota 4. Peningkatan Peran dan Fungsi Perlindungan Masyarakat di Jawa Barat
		1) Meningkatkan kualitas kerukunan keagamaan masyarakat	1. Pembangunan sarana keagamaan 2. Pembinaan Majelis Ta'lim 3. Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat, Infak, Sodaqoh
8.	Pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	1) Meningkatkan penanganan rehabilitasi lahan kritis serta konservasi hutan dan lahan	1. Koordinasi penanaman lahan kritis di lokasi milik Perhutani dan PTPN 2. Penanaman lahan kritis dan reboisasi 3. Penyuluhan dan implementasi rekayasa <i>agroforestry</i>
		2) Menurunnya tingkat pencemaran air, udara, dan tanah	1. Pengukuran kualitas air di 6 WS; 2. Pengukuran kualitas udara di perkotaan; 3. Pengurangan emisi program GRK; 4. Penegakan hukum lingkungan
		3) Meningkatkan upaya penanggulangan bencana	1. Mitigasi bencana
9	Penanggulangan kemiskinan	1) Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan	1. Pemberian Bantuan kesehatan 2. Pemberian bantuan pendidikan 3. Pemberian bantuan rumah tidak layak huni 4. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 5. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin 6. Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2018	Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikasi Kegiatan
		2) Penciptaan lapangan pekerjaan melalui investasi padat karya	1. Pemberian kerja sementara 2. Pelatihan ketrampilan bidang industri
		3) Meningkatkan usaha mikro dan kecil Meningkatkan usaha mikro dan kecil	1. Peningkatan akses permodalan bagi usaha mikro 2. Peningkatan akses pemasaran bagi usaha mikro dan kecil 3. Akses perbankan pada usaha mikro dan kecil
		4) Meningkatkan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 2. Peningkatan pemberian layanan dasar
		5) Penguatan perekonomian perdesaan	1. Pemberdayaan kelompok melalui komoditas pertanian 2. Penguatan cadangan lumbung pangan masyarakat
		6) Pengembangan kewirausahaan	1. Pengembangan usaha pembibitan/pembenihan 2. Peningkatan peran aktif masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, dan dunia usaha 3. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
10.	Penataan ruang daerah	1) Meningkatkan kualitas perencanaan ruang	1. Finalisasi Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis- nya 2. Memfasilitasi penyediaan peta untuk RRTRW Kabupaten/Kota 3. Menyusun RTR Kawasan Strategis Provinsi dan Kajian Lingkungannya 4. Finalisasi Revisi RZWP3K

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2018	Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikasi Kegiatan
			Provinsi Jawa Barat 5. Memfasilitasi Penyusunan RRTRW Kabupaten/Kota 6. Memfasilitasi rencana perwujudan Ruang Terbuka Hijau
		2) Meningkatnya konsistensi pemanfaatan ruang dan penggunaan tanah sesuai dengan rencana tata ruang	1. Koordinasi pemanfaatan ruang sektor-sektor strategis 2. Pelayanan Perizinan
		3) Meningkatnya kualitas pengendalian pemanfaatan ruang	1. Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2. Pengawasan Penataan Ruang 3. Penertiban terhadap pelanggaran penataan ruang 4. Mendorong kabupaten/kota untuk menetapkan peraturan zonasi 5. Mendorong kabupaten/kota untuk menetapkan insentif dan disinsentif
11.	Peningkatan Kualitas Kependudukan	1) Meningkatnya ketahanan keluarga	1. Penguatan pemahaman peran dan fungsi keluarga 2. Penguatan kemitran dalam pembangunan keluarga 3. Membangun sistem perlindungan anak berbasis komunitas 4. Penguatan kebijakan pembangunan keluarga
		2) Terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG)	1. Penyusunan kebijakan daerah KHPPA 2. Pembangunan pusat pelayanan terpadu berbasis masyarakat 3. Peningkatan peran media dan masyarakat 4. Penguatan dan pengembangan data gender dan anak 5. Peningkatan partisipasi

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2018	Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikasi Kegiatan
			perempuan dalam proses perencanaan pembangunan 6. Penguatan kebijakan keterlibatan perempuan dan anak dalam pembangunan
		3) Pengendalian Kuantitas dan Mobilitas Kependudukan	1. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan 2. Peningkatan kepesertaan KB 3. Peningkatan KB Pria
		4) Revitalisasi Sistem Informasi Administrati Kependudukan (SI AK)	1. Penataan administrasi kependudukan 2. Pemanfaatan penggunaan data kependudukan 3. Peningkatan sistem administrasi kependudukan 4. Peningkatan pelayanan informasi data kependudukan

Prioritas Pembangunan, Sasaran/Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2018 di atas merupakan rujukan untuk penentuan program pembangunan dan kegiatan pada Bab selanjutnya.